PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : prkppnganjuk@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Sdr. Pejabat Struktural dan Fungsional
Dari	:	Kepala Dinas
Tanggal	:	22 September 2023
Nomor	:	600/2164/411.315/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Undangan Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan III Tahun 2023

Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan III Tahun 2023, maka diminta kehadiran seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 25 September 2023
Jam	: 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	: Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan III Tahun 2023

Mengingat pentingnya acara, agar saudara hadir tepat waktu. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PRKPP NGANJUK

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : *prkppnganjuk@gmail.com*

NOTULEN

SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Nota Dinas	:	Nomor 600/2164/411.315/2023 Tanggal : 22 September 2023
Hari	:	Senin
Tanggal	:	25 September 2023
Waktu	:	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	:	Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan III Tahun 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Ketua	:	Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Pencatat	:	Nanik Widiastuti
Undangan	:	Pejabat Strukturan dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	10 (Sepuluh) orang sebagaimana daftar hadir terlampir

KEGIATAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Resume : Hasil rapat didapatkan :

1. Bahwa dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk segera membuat Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan sampai dengan akhir Triwulan III (akhir September 2023);
2. Terkait dengan penyusunan laporan ini, JF Perencana Ahli Muda Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk diminta untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang tertuang pada Laporan Triwulan III ini merupakan salah satu penilaian kinerja outcome program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Serapan anggaran hendaknya mengacu pada Anggaran Kas. Kinerja OPD dinyatakan baik ketika serapan anggaran juga baik (tinggi), yaitu sesuai Anggaran Kas dalam tiap Triwulannya. Adapun rata-rata capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah 58,25% dinyatakan pada predikat kinerja rendah, maka dengan ini pada Triwulan berikutnya hendaknya lebih ditingkatkan lagi serapan anggaran pada Dinas kita;
5. Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 050/2679/411.000/2023 Tanggal 18 September 2023, laporan evaluasi hasil perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut :
   a. Pendahuluan
   b. Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023
   c. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
   d. Penutup
6. Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai Triwulan III melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
7. Evauasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi factor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja serta merumuskan tindaklanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi (sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sebagai berikut :

a. Penilaian kinerja

   Membandingkan realisasi dan target kinerja

b. Analisis

   Mengidentifikasi factor pendorong dan factor penghambat

c. Tindaklanjut

   Merumuskan rekomendasi keputusan yang diambil

8. Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta masukan perbaikan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja
9. Tujuan Perangkat Daerah adalah meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, yang menjadi faktor penghambatnya adalah permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. Adapun faktor pendorongnya adalah terbentuknya forum dan pokja PKP sehingga diharapkan bisa menjembatani untuk membawa isu-isu bidang perumahan dan permukiman kepada para pengambil kebijakan
10. Sasaran Perangkat Daerah yang pertama adalah meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya alokasi anggaran dan peranserta masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni
11. Sasaran Perangkat Daerah yang kedua adalah meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan, yang menjadi faktor penghambat adalah banyaknya aset-aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan ditelantarkan
12. Program Pengembangan Perumahan
    a. Masalah :

       Permasalahan yang muncul sudah mulai berjalan baik diantaranya proses pengurusan rekomendasi siteplan, PBG, SLF namun kejadian bencana tidak dapat diprediksi;

b. Dampak :

Proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dapat diserap sehingga kegiatan berjalan lancar;

c. Solusi :

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran

13. Program Peningkatan PSU

a. Masalah :

Permasalah yang muncul sebelumnya sudah mulai teratasi, diantaranya proses serahterima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) tidak terhambat karena pemenuhan persyaratan administrasi mulai dilengkapi;

b. Dampak :

Proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dapat diserap sehingga kegiatan berjalan lancar;

c. Solusi :

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran

14. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

a. Masalah :

Program tersebut tidak dilaksanakan karena pelaksanaan program tersebut di pusat (Kementerian)

b. Dampak :

Proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dapat diserap sehingga kegiatan berjalan lancar;

c. Solusi :

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan pusat (Kementerian)

15. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Subkegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

a. Masalah :

Fokus Pokja PKP di Tahun 2023 adalah reviuw dokumen keciptakaryaan dan persampahan (PUPR dan DLH), sehingga belum menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi penanganan terkait Kawasan permukiman kumuh

b. Dampak :

Walaupun terdapat permasalahan disetiap program namun kegiatan berjalan dengan lancar

c. Solusi :

Mengintensifkan agenda rapat koordinasi internal terkait pembahasan penanganan Kawasan kumuh didalam Pokja PKP. Ditambah dengan adanya faktor pendorongnya adalah melakukan studi tiru/banding di Pemerintah Kota/Kabupaten terdekat untuk alternative mekanisme penanganan Kawasan kumuh yang lain

16. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

a. Masalah :

Adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan dan mencari alternatif pendanaannya

b. Dampak :

Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pada P-APBD Tahun 2023

c. Solusi :

Mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah serta penambahan pagu APBD untuk Bansos RTLH

17. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh

a. Masalah :

Adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan, dan mencari alternatif pendanaannya

b. Dampak :

Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pada P-APBD Tahun 2023

c. Solusi :

Mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah

18. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
    a. Masalah :

       Pelaksanaan pembangunan oleh Penyedia Jasa tidak segera bisa diselesaikan dikarenakan material pabrikan yang tidak siap dan banyaknya perubahan di lapangan, sehingga PHO sesuai kontrak
    b. Dampak :

       Terhambatnya proses kegiatan
    c. Solusi :

       Mengintensifkan rapat koordinasi mingguan dengan Tim Teknis dan Penyedia Jasa supaya dapat segera dicari upaya percepatannya . Serta menyegerakan perhitungan Addendum pekerjaannya
19. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
    a. Masalah :

       Adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan, dan mencari alternatif pendanaannya
    b. Dampak :

       Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pada P-APBD Tahun 2023
    c. Solusi :

       Mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah
20. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Mediasai Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Masalah :

       Masih berlangsungnya proses pengadaan tanah Tol Kertosono - Kediri, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan

b. Dampak :

Terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

c. Solusi :

1). Mempercepat jawaban atas sanggahan warga terdampak dengan selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat;

2). Mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait

21. Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

a. Masalah :

Belum jelasnya besaran pokok PSDH dan DPEH terkait TMKH Lahan Semantok, dan belum terbitnya SK Pelepasan/Penunjukkan sehingga kewajiban Bupati sebagai Pemohon Ijin belum bisa dilaksanakan dan tata batas belum bisa dilakukan

b. Dampak :

Terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

c. Solusi :

1). Mengintensifkan koordinasi dengan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait besaran kewajiban dan penerbitan SK ini, agar TMKH dapat segera berproses

2). Mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait

22. Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

a. Masalah :

1). Belum jelasnya beban penganggaran terkait PPTPKH dan mekanisme pelaksanaan tata batasnya, sehingga anggaran belum bisa direalisasikan

2). Terbatasnya anggaran yang tersedia dan waktu proses administrasi yang panjang

b. Dampak :

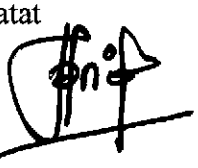
Terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

c. Solusi :

1). Mengintensifkan koordinasi dengan KLHK, BPKHTL dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait anggaran dan mekanisme tata batas PPTPKH, sehingga anggaran dapat segera direalisasikan

2). Terbatasnya anggaran yang tersedia dan waktu proses administrasi yang panjang

Pencatat



NANIK WIDIASTUTI

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

JAM : 08.00 WIB s.d. SELESAI

TEMPAT : RUANG KEPALA DINAS PRKPP

ACARA : RAPAT PEMBAHASAN PENGENDALIAN & EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN III TAHUN 2023

NO	N A M A	L / P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Erihannedy	L	Ka DPRKPP	1
2	Suyandi	L	Sekdin	2
3	AGUS SUHARYANTO	L	KABID PERMUKIMAN	3
4	PUTRANTI NIKEN_L.	P	JF TBP AHLI MUDA	4
5	PUAD PAUZI	L	JF. TBP AHLI	5
6	Heriyanti	P	JF. Perencana & Ku	6
7	UPIK DWI Y.	P	Kes.	7
8	IMAM BK	L	JF TBP AHLI MUDA	8
9	supartini	P	subag. umum	9
10	OLVI P	P	Kabid Perumahan	10

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640901 198703 1 013

DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL RUTIN

PEMBAHASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN III TAHUN 2023

DINAS PRKPP KABUPATEN NGANJUK
SENIN, 25 SEPTEMBER 2023



